

“Pelaksanaan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”

(Studi Kasus di Polrestabes Makassar)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum

pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUH.RACHMAT

NIM: 10500112046

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahaasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh.Rachmat

NIM : 10500112046

Tempat/Tgl. Lahir : Sungguminasa, 29 Desember 1993

Fakultas/Konsentrasi : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum

Alamat : BTN.Tamarunang Indah 1 Blok C2/No1

Judul : “Pelaksanaan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor” (Studi Kasus di
Polrestabes Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar karenanya batal demi hukum.

Samata, 10 November 2016

Penyusun,

MUH.RACHMAT

NIM : 10500112046

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pelaksanaan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)" yang disusun oleh Muh.Rachmat, NIM1: 10500112046, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan Pada Hari Senin, Tanggal 5 Desember 2016 M, bertepatan dengan 5 Rabi'ul Awwal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 5 Desember 2016 M
5 Rabi'ul Awwal 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Hum	(.....)
Munaqisy I	: Drs. H. Munir Salim, M.H	(.....)
Munaqisy II	: St. Nurjannah, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hamzah Hasan, M.Hi	(.....)
Pembimbing II	: Ahkam Jayadi, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alikum Wr. Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT. Dan shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Polrestabes Makassar”. Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad saw yang telah membawa umat manusia dari masa kejahiliyahan menuju masa yang berperadaban.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun, berkat bantuan, dorongan, dan kerjasama berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana, tapi lebih daripada itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan. Semoga keberadaan skripsi ini dapat memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, memotivasi dan membimbing penulis sehingga skripsi ini bias terselesaikan, diantaranya:

1. Ayahanda A.Bauru S.Pd, Ibunda tercinta Nurintang , Kakak tercinta wahyuni dan Adikku tersayang nurfirly yang selalu menantikan kesuksesan saya, mereka semua yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II dan III.
3. Prof.Dr.Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II dan III.
4. Istiqamah, S.H, M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar.
5. Dr Hamzah Hasan.,M.Hi, selaku Pembimbing I dan Ahkam Jayadi SH.,MH selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuannya dan pelayanan dalam penyelesaian studi mahasiswa.
7. Sahabat-sahabat di Lembaga IPPS UIN Alauddin Makassar dan Lembaga Masyarakat Advokasi Sulawesi Selatan yang telah menemani dan mendukung penulis dalam proses menyelesaikan studi.

8. Kakanda dan ayunda senior yang telah banyak menginspirasi penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Tidak terkecuali rekan rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus Kelompok IH 3.4angkatan 2012 Jurusan Ilmu Hukum, selaku teman seperjuanganku dalam menimbah ilmu di bangku perkuliahan.

Akhirul kalam, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalam

Makassar, 01 November 2016

Penulis

MUH.RACHMAT

NIM: 10500112046



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv-vi
DAFTAR ISI.....	vii-ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x-xv
ABSTRAK	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1-13
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
 BAB II TINJAUAN TEORETIS	 14-47
A. Penegakan Hukum (Law Enforcement).....	14
B. Penangkapan Dalam KUHAP	20
C. Pengertian Tindak Pidana	28
D. Pencurian	35
E. Hukum Mencuri Dalam Islam	44
F. Kerangka Konseptual	47

BAB III METODE PENELITIAN	48-51
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Data.....	49
D. MetodePengumpulan Data.....	50
E. Instrumen Penelitian.....	51
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	52-91
A. Aturan Hukum Dan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Penangkapan	52
B. Pelaksanaan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Aparat Polrestabes Makassar	59
1. Penangkapan Yang Disertai Dengan Surat Penangkapan.....	61
2. Penangkapan Tanpa Surat Penangkapan.....	73
3. Hasil Riset dan Wawancara Dengan Aparat Kepolisian Unit Satuan Resort Kriminal Polrestabes Makassar.....	74
4. Hasil Riset Dan Wawancara Dengan Tahanan Polrestabes Makassar.....	87
C. Kendala-Kendala Dalam Melakukan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	89
D. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.....	91

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengantitik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengantitk di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengantitik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	sad	S	es (dengantitik di bawah)
ض	dad	D	de (dengantitik di bawah)
ط	ta	T	te (dengantitik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengantitk di bawah)
ع	‘ain	‘	apostropterbalik

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathahdanya	Ai	a dan i
	fathahdanwau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathahdanalifatauya</i>	a	a dangaris di atas
	<i>kasrahdanya</i>	I	i dangaris di atas

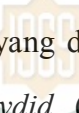
	<i>dammahdanwau</i>	U	u dangaris di atas
--	---------------------	---	--------------------

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamar butah* yang mati atau mendapat harkatsukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberitanda *syaddah*.

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut di kenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bilanama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).



ABSTRAK

Nama : MUH.RACHMAT
NIM : 10500112064
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah penangkapan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Polrestabes Makassar. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik antara polisi dengan masyarakat yang sering terjadi karena ketidak profesionalan dalam menjalankan tugas misalnya melakukan penangkapan tanpa prosedur serta melakukan kekerasan kepada tersangka.

Tujuan penulisan ini adalah 1). Untuk mengetahui aturan hukum dan perundang- undangan terhadap pelaksanaan penangkapan 2). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh aparat kepolisian wilayah polrestabes makassar 3). apa saja kendala dalam pelaksanaan penangkapan yang dihadapi oleh aparat kepolisian wilayah polrestabes makassar 4). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan penangkapan oleh aparat kepolisian wilayah polrestabes makassar .

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Polrestabes Makassar . Dalam memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung dan telaah pustaka serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan penangkapan di wilayah hukum polrestabes makassar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang diatur dalam KUHAP. Namun masih dijumpai tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan dan diskresi pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat pula diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses penegakan hukum di indonesia sehingga hal ini mengakibatkan tatkala sering muncul adanya konflik antara polisi dengan masyarakat.

Maka dari itu sangatlah diharapkan pihak kepolisian untuk memperhatikan masalah-masalah kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan suatu pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka karena dalam melakukan tugasnya pihak kepolisian haruslah menjunjung tinggi hak azasi manusia dan harus memakai asas praduga tak bersalah begitupun sebaliknya Masyarakat haruslah sadar bahwa proses penegakan hukum bukanlah hanya tugas dari aparat penegak hukum saja, melainkan juga tugas dari masyarakat dalam menanggulangi, menghadapi segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat

Kata Kunci : Pelaksanaan Penangkapan dan Pencurian

BAB 1

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Berdasarkan konstitusi yaitu Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Amandemen ketiga menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagai negara hukum sudah seharusnya dalam setiap kegiatan dan aktifitas masyarakat serta pemerintahan berdasarkan atas hukum. Hukum dijadikan panglima dalam penyelenggaraan Negara.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 berlaku adalah Undang Undang Nomor 28 Tahun 1997. Seiring dengan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah didasarkan pada paradigma baru. Diharapkan Undang-Undang ini dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dan reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab 1, pasal 1 ayat 3.

mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasar Pancasila dan UUD tahun 1945.

Sesuai dengan UUD 1945 Perubahan kedua, Ketetapan MPR RI NO VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengayoman swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan, dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep *good police* sebagai prasyarat menuju *good governance*.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya.

Mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan jaman maka profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, sebagaimana dalam Surah An-Nahl ayat 90 Menjelaskan sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (16: 90)²

Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya konflik antara polisi dengan masyarakat yang sering terjadi karena ketidak profesionalan dalam menjalankan tugas misalnya melakukan penyidikan tanpa surat dan dasar hukum yang kuat, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, melakukan kekerasan kepada tersangka.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: Wali, 2010).

Seperti yang dikutip dalam berita *ucanews.com*, salah satu ketidak profesionalan Polisi ialah dalam melakukan penangkapan terhadap Zulfikar Arif Ardil, 34, yang ditangkap oleh 6 aparat Polres Metro Jakarta Pusat dari rumah kos di Pasar Rumput, Jakarta Pusat pada 31 Maret lalu.

Zulfikar dituduh sebagai pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor di sebuah rumah di daerah Sawah Besar, Jakarta pada 27 Maret. Ia ditangkap bersama temannya, Bahrudin dan Zulkifli, namun Zulkifli dibebaskan sehari setelahnya. Hingga kini, Zulfikar dan Bahrudin ditahan di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat.

Eko Haridani Sembiring, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menjelaskan, saat dilakukan penangkapan, polisi tidak membawa surat tugas penangkapan, sehingga keluarga harus mencari Zulkifar, hingga akhirnya ditemukan pada 3 April. “Mereka baru mendapat surat penangkapan pada saat ditemukan. Keluarga Zulkifar dibiarkan mencari sendiri anggota keluarga mereka,” katanya.

Ia pun menilai prosedur penangkapan dilakukan tanpa melibatkan aparat setempat serta di surat penangkapan yang diperoleh pada 3 April tidak tercantum letak dan waktu tindak pidana kasus pencurian yang dituduhkan kepada mereka, hal yang menurut dia menyalahi aturan undang-undang bahkan selama proses pemeriksaan pun terjadi penyiksaan terhadap korban. Ada pola dimana korban dipaksa mengaku”, katanya.³

³ <http://indonesia.ucanews.com/2014/06/26/polisi-dikecam-terkait-dugaan-kasus-salah-tangkap/> pada tanggal 22 juni 2016 pukul 07.49 wita.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam pasal 16 s/d pasal 19 KUHAP yaitu :

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik. Sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 16 KUHAP.

Berdasarkan pasal 17 KUHAP bahwa :

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Dalam KUHAP dijelaskan pula bahwa penangkapan terbagi 2 yaitu Penangkapan dengan surat perintah penangkapan dan Tanpa surat perintah penangkapan (tertangkap tangan).

Dalam pasal 18 ayat 1 KUHAP,

“Pelaksanaan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, pihak kepolisian harus memperlihatkan surat tugas. Surat tugas tersebut harus menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia akan diperiksa.

Akan tetapi dalam pasal 18 ayat (2) disebutkan tentang tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Dalam melaksanakan wewenang penangkapan, penyidik tidak seratus persen berdiri sendiri. Penyidik diawasi dan dikaitkan dengan “Ketua Pengadilan Negeri” dalam melakukan setiap penangkapan. Pada setiap penangkapan, penyidik “wajib” memerlukan bantuan Ketua Pengadilan Negeri. Alasan kenapa penangkapan harus lebih dulu mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri atau dalam keadaan tertangkap tangan harus segera meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dimaksudkan sebagai tindakan “pengawasan” dan “koreksi” bagi penyidik karena masalah penangkapan erat sekali hubungannya dengan hak asasi manusia

Memperhatikan betapa tingginya perlindungan hak yang harus diberikan undang-undang kepada campur tangan kehidupan pribadi, wajar apabila pembuat undang-undang menentukan garis yang mempersempit keleluasaan penyidik melakukan tindakan penangkapan. Guna lebih terjamin ketertiban dan kepastian hukum, seperti yang dicantumkan didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta sebagaimana pula dijelaskan dalam QS. Ash-Shuraa [42]:39

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩) وَجَزَا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَلَمَنْ آتَنَصَرَ بَعْدَ ظُلْمَةٍ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ (٤١) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٢) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)

Terjemahnya :

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia”.⁴

Sekalipun tindakan penangkapan dibenarkan oleh Undang-Undang demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, namun penangkapan yang dibenarkan hukum tetap erat hubungannya dengan hak asasi manusia.

Di samping itu, tindakan penangkapan membawa akibat yang luas kepada kehidupan pribadi dan keluarga, karena tindakan penangkapan pasti mengundang perhatian luas lingkungan masyarakat yang akan menimbulkan siksaan batin bagi seluruh kehidupan keluarga atau karena penangkapan secara nyata bersifat upaya paksa (*dwang middeken*), langsung atau tidak langsung, tindakan penangkapan menimbulkan ketakutan bagi penghuni rumah.

Dalam penulisan hukum ini penulis khusus membahas tentang penangkapan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: Wali, 2010).

Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Pemberitahuan melalui media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut *curanmor* ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP dalam Pasal 362 KUHP, selain itu diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (Pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (Pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (Pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 KUHP (Pencurian di lingkungan keluarga)

Persoalan mengenai pencurian semakin lama semakin meningkat terkhusus di Daerah Makassar kasus pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) adalah kasus tindak kejahatan yang menjadi rangking pertama di Kota Makassar dalam keterangannya, AKBP Hotman Memaparkan, “Dalam sebulan, anggota kami telah berhasil meringkus 113 tersangka kasus curas dan curanmor. Jumlah ini terbilang lebih banyak dibanding pada februrai 2016 lalu yang hanya mencapai 55 tersangka. Ini berkat kerja keras anggota di lapangan.”⁵

Dalam uraian latar belakang tersebut, hal tersebut menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polrestaes Makassar)”**

⁵ <http://Republika.com/2015/02/17/Penangkapan-kasus-pencurian-kendaraan-bermotor/> pada tanggal 22 juni 2016 pukul 07.49 wita.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah pada “Pelaksanaan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polrestabes Makassar) untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang terdapat dalam skripsi ini.

Pelaksanaan Menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Secara legal, penangkapan didefinisikan sebagai “pendekatan atau penahanan seseorang guna menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan tindak kejahatan yang dicurigai”.⁶

Penangkapan terjadi ketika unsur berikut terpenuhi:

- a) seorang polisi memiliki alasan untuk percaya bahwa sebuah kejahatan telah terjadi (penyebab probabilitas);
- b) seorang polisi berniat membawa tersangka ke kantor untuk diperiksa; dan
- c) pihak yang ditangkap mengalami dan merasakan kehilangan kebebasan karena dibatasi gerak-geriknya.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dengan ketentuan yang diatur di dalam UU.

⁶ (Blackstone, 1979; Warner, 1983).

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan
Tindak Pidana menurut Simons,

“Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”

Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Disebutkan pula dalam Pasal 362 KUHP bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.

Oleh adalah kata penghubung untuk menandai pelaku

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1)).

"Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibukota provinsi.

Kota Makassar (Makassar:dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang) adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota Internasional serta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibukota Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi.

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Aparat Polrestabes Makassar ?
3. Apa Saja Hambatan Dan Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Polrestabes Dalam Melaksanakan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor ?

D. *Kajian Pustaka*

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang terdapat pandangan dari beberapa ahli. Adapun beberapa literatur yang di dalamnya membahas tentang praperadilan dan penggeledahan adalah sebagai berikut:

Rahman Syamsuddin, dalam bukunya “*Hukum Acara Pidana dalam Integrasi KEILMUAN*”

Hartono, dalam bukunya “*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*” ini merupakan upaya memecahkan masalah yang selama ini masih saja sering terjadi terutama dalam taraf penyidikan hingga ke proses peradilan pidana.

Andi Hamzah, dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana*” edisi revisi 2008 yang menyatakan bahwa Asas-Asas hukum pidana merupakan fundamen hukum pidana. Sejauh-jauh orang mempelajari atau menerapkan hukum pidana,

akan tetap harus kembali menelaah asas-asasnya yang terkandung didalam buku 1 KUHP.

Suparman Usman, dalam bukunya “Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia” yang menyatakan bahwa mentaati moral, etika dan tanggung jawab harus diwujudkan oleh setiap manusia, lebih-lebih harus diwujudkan oleh para pemimpin dan mereka yang berprofesi di bidang hukum.

Syamsuddin Amir, dalam bukunya “integritas penegak hukum” yang menyatakan bahwa masalah integritas aparat penegak hukum sudah menjadi masalah legenda ditanah air. Tidak mudah mendapatkan aparat penegak hukum yang baik dan jujur. Masyarakat kita saat ini seharusnya disadarkan, mereka mempunyai hak untuk menuntut, baik secara perdata maupun pidana, terhadap perbuatan aparat penegak hukum yang merugikan hak-hak asasi mereka.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian Kendaraan bermotor oleh Aparat Polrestabes Makassar ?
 - b. Untuk Mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan Aparat Polrestabes dalam melaksanakan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ?
2. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:
 - a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan yang nantinya dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, yang berhubungan dengan pelaksanaan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian Kendaraan bermotor oleh Aparat Polrestabes Makassar.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dan saran atau langkah yang lebih baik dalam proses penangkapan yang bermanfaat untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian proses penyidikan.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Penegakan Hukum (Law Enforcement)*

Negara Indonesia adalah negara hukum¹. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:²

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurut J.C.T Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3.

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm.46.

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting, Roeslan Saleh menyatakan, bahwa:

*“Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila”.*³

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.⁴

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka

³ J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenhallindo, 2007), hlm. 30.

⁴ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional* (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996), hlm. 15.

susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tiada suatu perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan hukum yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Struktur Hukum/Pranata Hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LP). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang.

Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa, Budaya/Kultur Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya:

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁵

⁵ Undang Undang No. 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*.

Dengan pemaparan teori penegakan hukum di atas, bahwa dalam penegakan hukum diperlukan adanya harmonisasi dari unsur unsur, mulai dari substansi/isi, struktur/aparaturnya, dan juga didukung oleh kulturnya. menyimpulkan bagaimanakah kecenderungan penegakan hukum di Indonesia dilihat dari tiga aspek tersebut.

Apabila dihubungkan dengan penegakan atau pelaksanaan ataupun keefektifan suatu undang-undang, maka suatu undang-undang dikatakan demikian apabila sebagian besar masyarakatnya mentaati aturan tersebut.



B. *Penangkapan Dalam KUHAP*

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang didalamnya terdapat dasar-dasar dan aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana, di samping itu, terdapat pula ketentuan mengenai kapan dan dalam hal apa pelaku dapat dikenakan atau dijatuhi pidana dan bagaimana cara penjatuhan pidana tersebut.

Hal yang disebut pertama merupakan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana atau yang kita kenal sebagai hukum pidana materil (hukum pidana substansif). Sedangkan yang disebut belakangan, mengenai bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut orang yang disangka tersebut kemuka pengadilan disebut dengan hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Menurut De Bos Kemper, hukum acara pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur apabila undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana. Simon berpendapat hukum acara pidana merupakan cara negara menggunakan haknya untuk memidana melalui alat - alat perlengkapannya.

Sedangkan Van Bemmelemen mengatakan hukum acara pidana tidak selalu melaksanakan hukum pidana materil, sebab hukum acara pidana sudah dapat bertindak meskipun baru ada persangkaan adanya orang yang melanggar atau memenuhi aturan -aturan hukum.

Menurut Seminar Hukum Nasional Ke-1 tahun 1963, hukum acara pidana adalah norma berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak apabila ada dugaan terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana. Adapun ruang lingkup hukum acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir

pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa.⁶Aturan-aturan hukum acara pidana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diharapkan sebagai satu kodifikasi hukum,maupun perundang-undangan yang tersebardi luar KUHAP.

Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan tersangka atau terdakwa sementara waktu di mana terdapat dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didukung bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan.pengertian tersebut dapat disimpulkan, penyidik adalah Polri yang berwenang melakukan penangkapan. Selain berwenang melakukan penangkapan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dengan dasar undang -undang khusus seperti dalam kasus korupsi.

1. Alasan Dan Syarat Penangkapan

Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, hal ini membedakan penangkapan dengan pemidanaan meskipun keduanya memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang. Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang.⁷Ketentuan mengenai penangkapan dalam KUHAP amat berbeda dengan

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.3.

⁷Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*(Bandung: PT Citra AdityaBarkti, 2007), hal.26

ketentuan dalam HIR, dahulu penangkapan dilakukan tanpa adanya bukti sehingga tidak terdapat kepastian hukum.⁸

Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan pada kepentingan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Dalam hal kepentingan penyelidikan tetap harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁹

Mengenai bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP sendiri tidak ada batasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, pengertian bukti permulaan yang cukup merujuk pada Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana.

Merujuk pada kedua peraturan di atas, bukti permulaan yang cukup adalah minimal ada laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah. Jadi, tidak cukup kalau hanya ada laporan dari pelapor. Harus ada minimal satu alat bukti yang sah menurut KUHAP.

⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.158.

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.159

2. Cara Penangkapan

Penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan, terdapat dua pembahasan yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik. Petugas keamanan seperti satpam atau hansip juga tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, sebab dalam kasus tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan.

Pelaksanaan penangkapan menurut Drs.DPM Sitompul, SH dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana; dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana; sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana; dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHAP.

b. Penangkapan Dengan Surat Perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.
- 2) Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi :
 - a) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.
 - b) Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.
 - c) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
 - d) Tempat pemeriksaan dilakukan.

Salinan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, pemberitahuan tidak dapat diberikan secara lisan. Apabila salinan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

Selain surat perintah penangkapan, aparat yang bersangkutan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Isi surat perintah tugas antara lain, pertimbangan dan dasar penangkapan; nama, pangkat, nrp, jabatan dan kesatuan tugas; tugas yang harus dilakukan; batas waktu berlakunya perintah tugas serta keharusan untuk membuat laporan hasil penangkapan bagi aparat yang diberi surat perintah tugas.

3. Batas Waktu Penangkapan

Batas waktu penangkapan ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu dilakukan untuk maksimum satu hari. Berdasarkan ketentuan ini seseorang hanya dapat dikenakan penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Lebih dari satu hari, berarti sudah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum. Jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan pada praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

Batasan lamanya penangkapan yang sangat singkat itu akan menjadi masalah bagi pihak penyidik, terutama di tempat-tempat atau daerah yang transportasinya sangat sulit, apalagi jika daerah masih tertutup dari sarana komunikasi. Keadaan yang demikian tidak memungkinkan dalam waktu satu hari dapat menyelesaikan urusan penangkapan dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Pedoman Pelaksana KUHAP memberikan jalan sebagai berikut:

- a. Penangkapan dilakukan atau dipimpin oleh penyidik agar segera dapat dilakukan pemeriksaan di tempat yang terdekat;
- b. Jika penangkapan dilakukan oleh penyidik, pejabat penyidik mengeluarkan surat perintah kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik. Namun, beberapa jalan tersebut tetap mengalami kesulitan, terutama terkait kewajiban penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka.

Penangkapan hanya diberikan kepada pelaku kejahatan sementara terhadap pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

4. Berita Acara Penangkapan

Setelah penangkapan selesai dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dan penyidik, ataupun masyarakat diwajibkan oleh itu dibuat berita acara penangkapan. Terhadap penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat maka berita acara penangkapan itu dibuat oleh petugas yang menerima tertangkap. Hal ini diatur didalam pasal 18 ayat 1 dan pasal 75 KUHAP.

Pasal 18 ayat 1 berbunyi :

“Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 75 KUHAP berbunyi :

1. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. pemasukan rumah;
 - f. penyitaan benda;
 - g. pemeriksaan surat;
 - h. pemeriksaan saksi;
 - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
2. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
3. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat tindakan tersebut pada ayat (1)

C. *Pengertian Tindak Pidana*

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana itu sendiri. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pembedaan. Secara umum pembedaan merupakan bidang dari pembentukan undang undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia poenali* yang artinya tiada ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar.

Istilah pidana banyak diberikan oleh para ahli. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik ini. Dengan demikian, pembedaan adalah pemberian nestapa yang dengan sengaja dilakukan oleh negara kepada pembuat delik.¹⁰

¹⁰ A.Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pembedaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), hal. 24.

Di samping itu, Bonger, seorang ahli kriminologi, mengartikan pidana sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.¹¹

Pidana seringkali diartikan sebagai ‘suatu hukuman’. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan dan perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan hukuman itu menurut beberapa filsafat bermacam-macam, misalnya:

1. Berdasar atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan;
2. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat memberi rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan;
3. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan;
4. Pendapat lain lagi mengatakan bahwa dasar dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹²

Jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut pandang pidana dan kriminologi, dan sebagai suatu kenisbian pandangan tentang kejahatan, deliquensi, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses

¹¹ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 2003), hal. 24-25.

¹² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 204.

kriminisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*" atau "*delik*".

Di samping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu "peristiwa pidana (Simon)", "perbuatan pidana (Moeljatno)". Peristiwa pidana, menurut Simon, adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.¹³

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu:

"perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut".

Selanjutnya Moeljatno berpendapat:

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian

¹³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 54

yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁴

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*, *onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Mengenai istilah tindak pidana menurut Moeljatno memberi komentar sebagai berikut, istilah ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun katanya lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.

Wiryo Projodikoro menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana.¹⁵

Berbicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subyek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa Tanpa Tahun), hal. 4.

¹⁵ Wiryo Projodikoro (b), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT. ERESKO, 2002), hal. 50.

subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya, tanpa adanya unsur kesalahan, berarti tidak telah terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya suatu peristiwa pidana.

Pengertian tindak pidana menurut Satochid yaitu:

1. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
2. Dilarang dan diancam oleh Undang-undang;
3. Melawan hukum;
4. Orang yang berbuat dapat dipersalahkan;
5. Orang yang berbuat dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping itu E. Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*Handelen atau doenpositief*) atau melalaikan (*verzuim atau nalaten atau niet-doen*, negatif maupun akibatnya)

Dalam hal ini dapat ditentukan bahwa “peristiwa” itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan (dapat) dipertanggung-jawab-pidanakan, kepada subyek. Jika salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut belum atau tidak terjadi. Akan tetapi, bukan suatu tindakan yang terlarang yang oleh undang-undang diancam suatu pidana, suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan “tindakan” dalam Pasal yang bersangkutan, sedangkan tidak terdapat kesalahan pada petindak dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa

melanggar larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:¹⁶

Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula, untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subyek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/
perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

¹⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 71.

Kelima unsur tersebut dikategorikan menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang termasuk unsur subyektif adalah subyek dan kesalahan.

Sedangkan yang termasuk unsur obyektif adalah sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor obyektif lainnya. Kelima unsur tersebut haruslah ada dalam suatu tindak pidana.

Kelima unsur tersebut haruslah ada dalam suatu tindak pidana. Hal ini sebenarnya dapat membedakan antara tindak pidana dan peristiwa pidana. Berbicara mengenai tindak pidana pada dasarnya harus ada subyek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, berarti ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.

Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor obyektif lainnya, tanpa adanya unsur kesalahan, berarti tidak telah terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya suatu peristiwa pidana.

D. *Pencurian*

1. Pengertian Pencurian

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”. Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

2. Jenis-jenis dan Unsur-unsur Pencurian

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHPidana yaitu:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)
- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)
- e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)
- f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan rumusan Pasal tersebut diatas sebagai berikut:

- 1). Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur-Unsur Objektif :

- a. Mengambil;
- b. Suatu barang/ benda;
- c. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

2. Unsur-Unsur Subjektif:

- a. Dengan maksud
- b. Memiliki untuk dirinya sendiri
- c. Secara melawan hukum

Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHPidana

1. Unsur objektif

a. Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

- 1). Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
- 2). Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain; Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut yaitu antara lain:

Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.

Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, apabila waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

b. Suatu barang/ benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak.

Benda yang dikategorikan barang/ benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/ benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian.

Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut tidak dimiliki oleh siapa pun, demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak lagi menjadi suatu objek pencurian.

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/ benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/ barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/ benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/ barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/ benda tersebut tidak bersifat penuh.

2. Unsur subjektif

a. Dengan maksud unsur kesengajaan

Dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHPidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/ barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri,

menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

c. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.

2). Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi

(Pasal 363 KUHPidana), yaitu:

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat

lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana.

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1 Pencurian ternak

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, ataugempalaut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau Bahaya perang.

Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- a). Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

4). Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu ;

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.;

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- c) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

5) Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP) yaitu:

“Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pe njatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.

6) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), yaitu:

- a) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- b) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhdap orang itu hanya mungkin di adakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- c) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga.

Pencurian dalam Pasal 367 KUHPidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHPidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

E. Hukum Mencuri Dalam Islam

Pada kenyataannya mencuri termasuk perbuatan dosa besar, dan para ulama telah sepakat tentang keharamannya, begitu juga hukuman para pelaku pencuri telah ditetapkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijm' para ulama.

1. Dasar Sanksi Hukum Bagi Pencuri Dalam Al-Qur'an

Allah SWT telah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Al-Ma'idah 38)

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al Misbah menjelaskan makna ayat tersebut adalah bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa, yakni pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah yang

menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal serupa. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Tetapi jika ia menyadari kesalahannya dan menyesali lalu bertaubat, maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah meakukan penganiayaannya yakni pencurian itu walaupun telah berlalu waktu yang lama dan memeperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang telah dicurinya atau mengembalikan senilainya kepada pemiliknya yang syah, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya sehingga ia tidak akan disiksa di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi nah penyayang.

Ibnu al-Qayyim mengatakan, hukuman potong tangan bagi pencuri lebih mengena dan lebih mengajarkan daripada hukum cambuk. Namun kejahatannya belum mencapai tarap yang layak dihukum mati, dan hokum yang sesuai dengan tindakan tersebut adalah menghilangkan salah satu dari anggota tubuhnya.

Beliau juga berpendapat, dalam kejahatan pencurian tidak disyari'atkan menghilangkan nyawa, tapi disyariatkan kepada mereka hukuman tertentu yang bersumber ada kebijaksanaan, kasih sayang, kelembutan, kebaikan dan keadilan-Nya, guna mengikis dan memutuskan keinginan berbuat zalim dan besmusuhan sesama manusia. Disamping itu agar manusia merasa puas dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Pemilik dan Penciptanya, sehingga tidak keinginan untuk merampah hak orang lain.

Menurut zhahir QS Al-Ma'idah 38 hukuman tindak pidana pencurian berupa potong tangan (qath al-yad). Mengenai hal ini pendapat para ulama terbagi menjadi dua:

Pertama, hukuman tersebut bersifat taabbudi karena itu tidak dapat diganti hukuman lain, dengan penjara atau lainnya, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa Rasul. Demikian menurut sebagian ulama.

Kedua, hukuman tersebut ma 'qulul ma'na, yakni mempunyai maksud dan pengertian yang rasional. Karena itu ia dapat berujud dengan hukuman lain, tidak harus dengan potong tangan. Demikian menurut sebagian ulama. Menurut para pendukung pendapat kedua ini, yang dimaksud dengan "potong tangan" sebagaimana ditegaskan dalam ayat adalah "mencegah melakukan pencurian". Pencegahan tersebut dapat diwujudkan dengan penahanan dalam penjara dan sebagainya, tidak mesti harus dengan jalan potong tangan. Dengan demikian, ayat tersebut dapat berarti: Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, cegahlah kedua tangannya dari mencuri dengan cara yang dapat mewujudkan pencegahan.

2. Dasar Sanksi Hukum Bagi Pencuri Dalam Al-Hadist

اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ

Terjemahnya :

"Potonglah karena (mencuri sesuatu senilai) seperempat dinar, dan jangan dipotong karena (mencuri) sesuatu yang kurang dari itu". (HR. Bukhori)

لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Terjemahnya :

"Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali (jika ia telah mencuri sesuatu) senilai seperempat dinar atau lebih". (HR. Muslim)

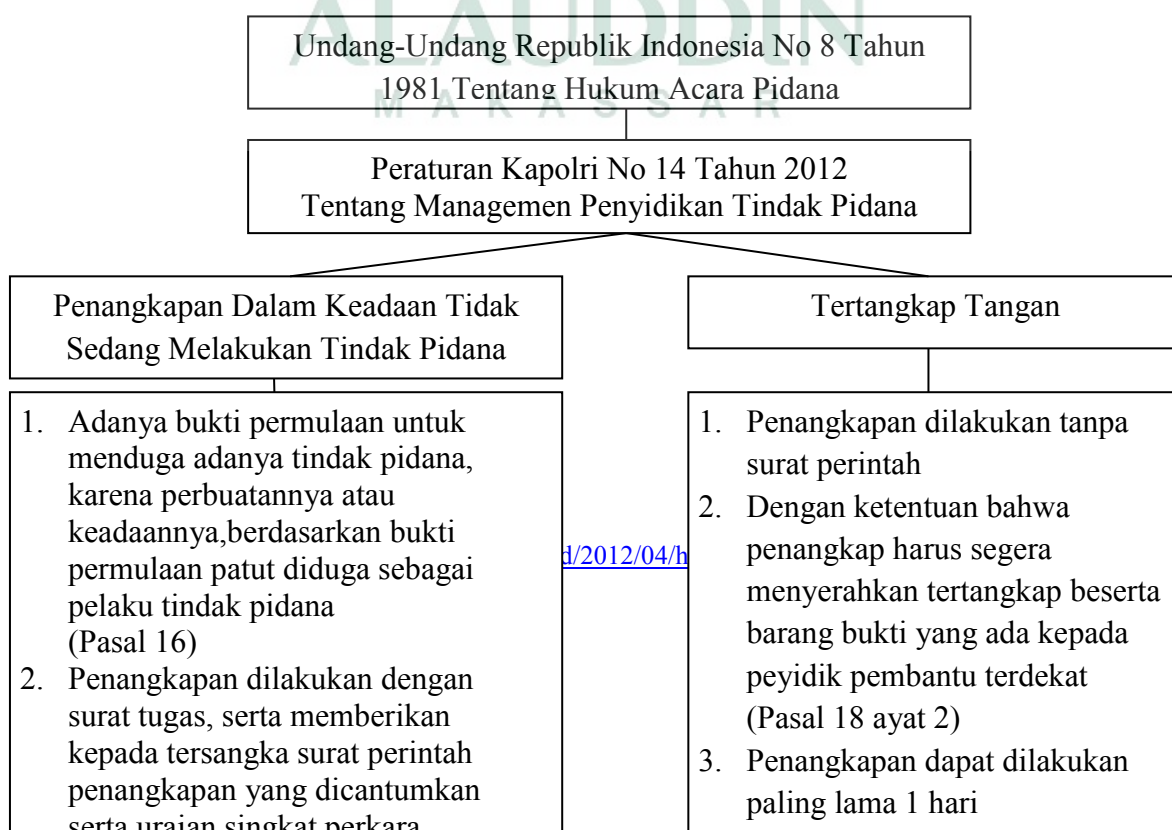
Seperempat dinar pada waktu itu adalah senilai tiga dirham, dan satu dinar itu senilai dengan duabelas dirham.

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, menjelaskan hadits di atas bahwa yang di jadikan patokan hukuman potong tangan ini adalah emas, kerana emas

adalah barometer semua perhiasan yang ada di bumi. Beliau juga mengutip pendapat Ibnu Hazm yaitu pencuri dikenai hukum potong tangan, baik barang yang dicuri itu sedikit maupun banyak. Kecuali emas, tidak akan dilakukan hukuman potong tangan jika emas yang diambil senilai kurang dari seperempat dinar.¹⁷

I. *Kerangka Konseptual*

Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti dan didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai andasan penelitian. Maka dari itu untuk lebih memudahkan memahami substansi objek penelitian, maka di uraikan kerangka konseptual dengan singkat berdasarkan topik penelitian dengan beberapa variabel, Sebagai berikut.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Polrestabes Makassar . Dalam memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung dan telaah pustaka serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian:

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Resort Kota Besar Makassar memiliki kewenangan dan fungsi dalam melakukan proses penangkapan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam menegakkan supremasi hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dan *yuridis normatif*. Penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis empiris* berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif* berarti mengkaji tentang perundang-undangan dengan teori-teori hukum mengenai pelaksanaan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti² yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi³ yakni data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

¹Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

²Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 57.

³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 57.

Data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan:⁴

- a. Bahan hukum primer, berupa Peraturan perundang-undangan
- b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel ilmiah, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan KBBI

D. *Metode Pengumpulan Data*

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penyusun teliti.
2. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁵
Wawancara dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini, dilakukan wawancara dengan Satuan Reserse dan Kriminal dan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.
3. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.⁶

⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 392.

⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 72.

⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h. 100.

Tujuan observasi/pengamatan terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut.⁷

Metode observasi ini, digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah:

1. Daftar pertanyaan;
2. Alat tulis yaitu ballpoint dan kertas;
3. Alat rekam.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka⁸. Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan penilaian apakah dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pelaksanaan penangkapan dapat dijadikan pedoman untuk tercapainya suatu supremasi hukum dalam penerapannya ditengah-tengah masyarakat yang mengalami penangkapan oleh aparat penegak hukum, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

⁷Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 70.

⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Aturan Hukum dan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Penangkapan*

Dalam KUHAP atau undang-undang no 8 tahun 1981 terdapat banyak peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melakukan proses beracara melakukan proses dalam hukum pidana. Demikian halnya mengenai tindakan penangkapan terdapat pula pengaturannya di dalam KUHAP. Adapun hal-hal yang diatur didalam KUHAP adalah :

1. Pihak Yang Berwenang Melakukan Penangkapan
2. Alasan dan Syarat Melakukan Penangkapan
3. Jenis Penangkapan
4. Batas Waktu Penangkapan
5. Berita Acara Penangkapan

1. Pihak Yang Berwenang Melakukan Penangkapan

Suatu kejelasan siapa pihak yang berwenang dalam melakukan penangkapan adalah penting untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum, untuk itu KUHAP telah menetapkan pihak-pihak yang berwenang melakukan penangkapan antara lain :

a. Penyelidik

Dasar hukumnya pasal 16 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :

“Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan”

b. Penyidik dan Penyidik Pembantu

Dasar hukumnya pasal 16 ayat 2 KUHAP yang berbunyi :

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”

c. Setiap orang/siapa saja

Dasar hukumnya pasal 111 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik”

2. Alasan Dan Syarat Penangkapan

Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, hal ini membedakan penangkapan dengan pemidanaan meskipun keduanya memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang. Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang.¹

Ketentuan mengenai penangkapan dalam KUHAP amat berbeda dengan ketentuan dalam HIR, dahulu penangkapan dilakukan tanpa adanya bukti sehingga tidak terdapat kepastian hukum.²

¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra AdityaBarkti, 2007), hal.26

² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.158.

Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan pada kepentingan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Dalam hal kepentingan penyelidikan tetap harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup.³

Mengenai bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP sendiri tidak ada batasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, pengertian bukti permulaan yang cukup merujuk pada Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana.

Merujuk pada kedua peraturan di atas, bukti permulaan yang cukup adalah minimal ada laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah. Jadi, tidak cukup kalau hanya ada laporan dari pelapor. Harus ada minimal satu alat bukti yang sah menurut KUHAP.

³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.159

3. Jenis Penangkapan

Pelaksanaan penangkapan menurut Drs. DPM Sitompul, SH dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana; dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana; sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana; dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut.

Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHAP.

b. Penangkapan Dengan Surat Perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawasurat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.
- 2) Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi :

- a) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.
- b) Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.
- c) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
- d) Tempat pemeriksaan dilakukan.

Salinan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, pemberitahuan tidak dapat diberikan secara lisan. Apabila salinan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

Selain surat perintah penangkapan, aparat yang bersangkutan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Isi surat perintah tugas antara lain, pertimbangan dan dasar penangkapan; nama, pangkat, nrp, jabatan dan kesatuan tugas; tugas yang harus dilakukan; batas waktu berlakunya perintah tugas serta keharusan untuk membuat laporan hasil penangkapan bagi aparat yang diberi surat perintah tugas.

4. Batas Waktu Penangkapan

Batas waktu penangkapan ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu dilakukan untuk maksimum satu hari. Berdasarkan ketentuan ini seseorang hanya dapat dikenakan penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Lebih dari satu hari, berarti sudah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum. Jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan pada praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

5. Berita Acara Penangkapan

Setelah penangkapan selesai dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dan penyelidik, ataupun masyarakat diwajibkan oleh itu dibuat berita acara penangkapan. Terhadap penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat maka berita acara penangkapan itu dibuat oleh petugas yang menerima tertangkap. Hal ini diatur didalam pasal 18 ayat 1 dan pasal 75 KUHAP.

Pasal 18 ayat1 berbunyi :

“Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 75 KUHAP berbunyi :

1. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. pemasukan rumah;

- f. penyitaan benda;
 - g. pemeriksaan surat;
 - h. pemeriksaan saksi;
 - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
2. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
 3. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat tindakan tersebut pada ayat (1)

B. *Pelaksanaan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Aparat Polrestabes Makassar*

Pekerjaan polisi dan kewenangan polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sulit, mengingat adanya fungsi dalam tugas pokok kepolisian negara republik indonesia sebagai undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Menurut isi pasal tersebut polisi juga berperan sebagai salah satu alat penegak hukum yakni sebagai penyidik dalam bidang pengadilan. Tugas tersebut terutama ditujukan terhadap tindak pidana yang merintangi tujuan dicapainya masyarakat adil dan makmur.⁴

Dalam melaksanakan Tugas pokok polri memiliki fungsi dan peranan sebagai pengabd, pelindung dan pengayom masyarakat. Oleh karena fungsi dan perananan tersebut diatas , maka terhadap masyarakat yang tersesat yaitu masyarakat yang melanggar peraturan hukum dan perundang-undangan serta berbagai macam bentuk pidana, maka polri harus cepat dan tanggap untuk mengambil tindakan berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku.⁵ Hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut khususnya pihak kepolisian sebagai petugas yang diberikan mandat oleh negara untuk menyidik tindak kejahatan agar dapat diproses dipengadilan.

⁴ *Buku pedoman pelaksanaan tugas POLRI dilapangan*, 1992 hal : 59

⁵ Surat keputusan direktur pendidikan polri, *buku pelajaran umum kepolisian*, hal : 173

Suatu hal yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, semua manusia adalah ciptaan tuhan dan semua pasti akan kembali kepada tuhan. Tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara satu dengan lainnya, semua adalah sama-sama mempunyai harkat dan martabat yang sesuai dengan hak-hak azasi yang melekat pada diri setiap manusia.

Manusia sebagai hamba tuhan yang juga sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lainnya harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk tuhan. Sebagai manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan serta martabat harkat pribadi yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang tanpa kecuali. Tidak ada seorangpun yang ingin direndahkan dan diperlakukan dengan tidak layak. Semua manusia tidak sudi mendapat perlakuan yang berbeda dengan manusia lain baik dihadapan hukum maupun dalam pemerintah. Manusia ditakdirkan memiliki perasaan dan hati nurani yang peka. Manusia tidak akan pernah senang dan akan terluka hatinya atas setiap perlakuan yang biadab.

Bersumber dari landasan persamaan derajat hak dan kewajiban serta harkat dan martabat yang ada pada setiap diri manusia tersebut melahirkan suatu keinginan kebutuhan akan adanya suatu peraturan hukum yang benar-benar adil atau paling tidak mendekati keadilan yang mampu menjamin kepastian hukum bagi setiap manusia untuk diperlakukan secara wajar dengan cara-cara manusiawi, sekalipun yang dihadapi dan diperiksa oleh polisi itu adalah seorang tersangka termasuk didalam hal tersebut diatas termasuk tindakan penangkapan.

Dalam menghadapi dan memeriksa suatu tindak pidana (melakukan penyelidikan/penyidikan) khususnya penangkapan tidaklah semudah seperti kita membalikan telapak tangan karena dalam pelaksanaannya membutuhkan pemahaman manusia dan kemanusiaan, dimana disuatu pihak terdapat suatu harkat

dan martabat yang mesti dilindungi dan dilain pihak ada pemenuhan tujuan tindakan penegakan hukum yakni untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan penegakan hukum guna untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat jangan sampai mengorbankan harkat dan martabat tersangka dikorbankan kepentingan masyarakat.

Polri yang dalam hal ini mempunyai salah satu wewenang untuk mengambil suatu tindakan penangkapan memegang peranan penting dan menempati posisi yang vital dan utama didalam penentuan serta pemenuhan tujuan dimaksud.

Untuk itu didalam tulisan ini dilakukan suatu penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara dan riset diwilayah hukum polrestabes makassar, untuk mengetahui praktek pelaksanaan penangkapan secara terperinci dan jelas.

1. Penangkapan

a. Penangkapan Yang Disertai Dengan Surat Penangkapan

1) Sumber Alasan Penangkapan

Didalam pelaksanaan penangkapan tugas untuk menindak atau untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, dilalui polisi dalam dan tahapan-tahapan. Upaya untuk menindak atau menyidik suatu tindak pidana tersebut salah satunya adalah dengan melakukan penangkapan. Orang yang akan ditangkap polisi adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana yang diketahui polisi melalui :

a) Laporan

Adapun hal-hal yang terkandung didalam laporan adalah :

- (1) Inti laporan ialah semata-mata pemberitahuan, bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan seseorang
- (2) Laporan dapat dilakukan oleh setiap orang

(3) Laporan dapat diajukan dan diterima setiap waktu

(4) Laporan dapat dicabut/ditarik kembali.

b) Pengaduan

Adapun Hal-hal yang terkandung dalam pengaduan adalah :

(1) Inti dari pengaduan ialah permintaan yang datang dari orang yang menderita akibat kejahatan tertentu, agar dilakukan penuntutan kepada orang yang melakukan kejahatan

(2) Pengaduan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tertentu berdasarkan undang-undang dan hanya mengenai beberapa kejahatan tertentu saja

(3) Terikat pada jangka waktu tertentu yaitu harus diajukan dalam waktu 6 bulan (pasal 74 KUHP)

(4) Dapat dicabut kembali/ditarik dalam jangka waktu 3 bulan

c) Penemuan langsung oleh petugas

Adapun Hal-hal yang diperhatikan didalam penemuan langsung oleh polisi:

(1) Apabila anggota polisi menghadapi dan mengalami atau menyaksikan sendiri telah terjadi sesuatu yang meresahkan dan merugikan seseorang serta diduga merupakan tindak pidana.

(2) Penemuan ini dapat diketahui/ditemukan oleh polisi ketika sedang melakukan patroli.⁶

⁶ Rimba Zuraya, B.A Unit Sat Reskrim Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 9 Agustus 2016

Kemudian laporan/pengaduan tentang yang diduga tindak pidana tersebut akan diteliti oleh polisi. Meneliti laporan/pengaduan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana untuk memperoleh kejelasan tentang :

- a. Apakah yang terjadi
- b. Dimana terjadi
- c. Bilamana terjadi
- d. Siapa yang terlibat
- e. Dengan apa dilakukan
- f. Bagaimana terjadi
- g. Mengapa dilakukan

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat, bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diresahkan atau merugikan serta mengganggu hak-hak seseorang yang diduga merupakan tindak pidana, kemudian oleh petugas polisi yang menerima laporan atau pengaduan tersebut dicatat dan dibuat dalam suatu laporan polisi kemudian diteliti laporan atau pengaduan tersebut untuk dapat dilanjutkan pada tindakan-tindakan berikutnya/tindakan lanjutan.

2) Tindakan Lanjutan

Setelah membuat laporan polisi, maka polisi berdasarkan laporan polisi melakukan tindakan lanjutan untuk mengembangkan laporan polisi tersebut. Adapun tindakan-tindakan lanjutan yang dilakukan oleh polisi berupa

- a) Mengadakan pengamanan
- b) Mengadakan perlindungan
- c) Mengadakan pengawasan
- d) Dan penyelidikan

Pada tindakan penyelidikan dilakukan oleh anggota polisi dalam satuan reskrim. Tindakan-tindakan ini berupa :

- (1) Mencari/mengumpulkan keterangan, data atau fakta yang dapat dijadikan bukti atau kejelasan yang lebih lengkap.
- (2) Mencari keterangan, alamat dan identitas tentang tersangka, saksi dan barang bukti serta korban.
- (3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal.
- (4) Melakukan pengecekan dan mengusahakan informasikan tentang keterangan data atau fakta yang telah diperoleh.
- (5) Melakukan interview untuk mendapatkan keterangan/kejelasan
- (6) Mengadakan tindakan-tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab⁷

Disamping tindakan penyelidikan diatas yang lebih banyak menggunakan wewenang menurut KUHAP satuan reskrim juga melakukan tindakan dan upaya yang lebih dititik beratkan kepada segi teknis dan kerahasiaan yang belum dijangkau dalam perumusan KUHAP, sejauh menyangkut aspek penyelidikan reskrim itu antara lain adalah :

- (1) Interview

Interview atau wawancara adalah untuk memperoleh keterangan dari orang yang diduga memiliki atau diduga memiliki keterangan, interview dapat dilakukan dengan terbuka atau terselubung.

- (2) Obeservasi

Obeservasi adalah pengamatan dengan panca indra secara teliti terhadap orang tempat atau kejadian.

⁷ *Petunjuk Teknik Reserse*, Hal : 6

(3) Surveillance

Surveillance adalah pengamatan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda.

(4) Under Cover

Under Cover adalah penyamaran yaitu tindakan yang dilakukan dengan menyusup ke dalam sasaran sehingga didapatkan keterangan sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana yang diselidiki.⁸

Kemudian berdasarkan laporan polisi, laporan hasil penyelidikan dan hasil pengembangan dalam pemeriksaan suatu tindakan pidana, jika merupakan suatu hasil lengkap dari rangkaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas akan diserahkan kepada atasan untuk dilakukan penyelidikan.

Oleh penyidik/penyelidik jika dirasakan sudah terdapat cukup bukti permulaan yang cukup akan dikeluarkan perintah untuk melakukan penyidikan dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merupakan wewenang penyidik pembantu antara lain adalah melakukan tindakan penangkapan.

Menurut penyidikan polisi di polrestabes makassar bukti permulaan yang cukup menurut mereka adalah :

- a. Laporan polisi
- b. Keterangan saksi

Penangkapan ini dapat dilakukan sendiri oleh penyidik/penyelidik pembantu sendiri atau dapat juga dilakukan oleh penyidik tetapi harus ada perintah dari penyidik/penyelidik pembantu.

⁸ Rimba Zuraya, B.A Unit Sat Reskrim Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 9 Agustus 2016

3) Tindakan Penangkapan

Didalam melakukan penangkapan ada 2 tahapan yang dilalui yaitu :

a) Persiapan Penangkapan

Sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu persiapan yang dilakukan penyidik adalah menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan. Surat-surat yang berwenang menandatangani adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu :

(1) Surat perintah tugas memuat :

- (a) Pertimbangan dan dasar.
- (b) Nama, pangkat, nrp, jabatan dan kesatuan petugas
- (c) Tugas yang harus dilakukan
- (d) Batas waktu berlakunya surat perintah tugas

(2) Keharusan bagi petugas untuk membuat laporan tentang hasil pelaksanaan tugas, surat perintah penangkapan harus memuat:

- (a) Pertimbangan dan dasar
- (b) Nama-nama petugas, pangkat, nrp dan jabatan
- (c) Identitas orang yang akan ditangkap
- (d) Uraian singkat tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan pasal pidananya
- (e) Batas waktu berlakunya surat-surat perintah penangkapan
- (f) Surat perintah penangkapan dibuat dalam rangkap 9.⁹

(3) Petugas menguasai data dan informasi mengenai sasaran penangkapan antara lain meliputi :

- (a) Identitas lain selain yang dicantumkan dalam surat perintah
- (b) Sifat dan kebiasaan orang yang ditangkap

⁹ Himpunan juklak dan juknis tentang proses penyidikan tindak pidana, jakarta, 1937, hal :

- (c) Jumlah dan kekuatan pesenjaan orang yang akan ditangkap dan kemungkinan adanya pihak tertentu yang akan membantu/melindunginya, Keadaan dan situasi pengepungan/ penggerebekan
 - (d) Disusun rencana pengepungan/penggerebekan
 - (e) Melengkapi petugas dengan peralatan/sarana yang diperlukan sesuai dengan tugas penangkapan.¹⁰
- b) Pelaksanaan Penangkapan

Dalam pelaksanaan penangkapan perlu diperhatikan adalah :

- (1) Penangkapan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang namanya tercantum didalam surat perintah penangkapan
- (2) Apabila penangkapan dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik /penyidik pembantu, maka penangkapan selain dengan surat penangkapan juga harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dari penyidik/penyidik pembantu yang memerintahkan.
- (3) Penangkapan dikenakan terhadap seseorang yang namanya / identitasnya tercantum didalam surat perintah penangkapan.

Cara-cara pelaksanaannya :

- (1) Penyidik/ penyidik pembantu yang melakukan penangkapan memberikan 1 lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka.
- (2) Penyidik yang melakukan penangkapan atas perintah penyidik/penyidik pembantu terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas, kemudian memberikan 1 lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka.
- (3) Satu lembar surat penangkapan diberikan kepada keluarga orang yang ditangkap

- (4) Setiap kali melakukan penangkapan harus dibuatkan berita acara penangkapan yang harus ditanda tangani penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penangkapan dan oleh orang yang ditangkap sebanyak 7 lembar.
- (5) Sesudah atau sebelum melakukan penangkapan sebaiknya diberitahukan kepada kepala desa/lingkungan dimana tersangka yang ditangkap bertempat tinggal/berdiam,
- (6) Penangkapan dilakukan diluar daerah hukum suatu kesatuan agar memberitahukan dan segera supaya dilaksanakan bersama-sama dengan penyidik/penyidik pembantu yang ditunjuk oleh kepala kesatuan daerah hukum dimana penangkapan akan dilakukan
- (7) Dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang berada didalam rumah atau tempat tertutup lain , dapat dilakukan sebagai berikut :
 - (a) Diusahakan/ditunggu agar tersangka keluar dari dalam rumah dan penangkapan dapat dilakukan diluar rumah
 - (b) Dalam hal tersangka tidak mau keluar rumah, maka apabila waktu,keadaan dan pertimbangan teknis memungkinkan, terlebih dahulu mengusahakan diperolehnya izin dari ketua pengadilan negeri setempat sekurang-kurangnya lisan (dapat melalui telepon)
 - (c) Dalam hal usaha untuk mendapatkan izin tidak memungkinkan sedangkan tersangka tidak akan mau keluar dari dalam rumah dan dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, maka atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa penyelidik atau penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan tindakan lain yaitu memasuki rumah/tempat tertutup dengan cara sebagai berikut :

1. Dalam memasuki rumah, tempat tertentu harus lebih berhati-hati dan kesiagaan tinggi serta memperhatikan taktik dan teknik pengepungan dan penggerebekan rumah.
 2. Setelah memasuki rumah tempat tertutup tersebut supaya diusahakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Diusahakan supaya tersangka keluar menemui penyidik /penyidik pembantu.
 - b. Jelaskan kepada tersangka apa sebab akan dilakukan penangkapan atas dirinya.
 - c. Dalam hal tersangka tidak mau keluar atau tetap bersembunyi maka petugas supaya memberikan peringatan lain dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka.
 - d. Bila perintah pertama tersebut tidak dipatuhi, maka supaya diulang sampai perintah ketiga.
 - e. Apabila perintah ketiga juga tetap tidak diindahkan maka supaya petugas dengan paksa atau melakukan penangkapan atas tersangka karena telah melawan perintah petugas
- (8) Dalam hal usaha untuk memasuki rumah, tersangka atau penghuni tidak mau membukakan pintu dan ada tanda-tanda akan adanya perlawanan maka :
- (a) Kepala team yang akan melakukan penangkapan mengatur posisi petugas untuk mengatur pengamanan dan pengawasan agar tersangka tidak meloloskan diri, antara lain dengan menutup atau menjaga semua jalan keluar.

- (b) Kepala team memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka, memerintahkan agar tersangka menyerahkan diri,
- (c) Apabila tersangka tidak memenuhi perintah maka :
 - 1. Kepala team memerintahkan sekali lagi kepada tersangka agar keluar dan menyerahkan diri.
 - 2. Dalam hal perintah tersebut tidak diindahkan juga kepala team memberikan peringatan terakhir.
 - 3. Apabila peringatan tetap tidak diindahkan juga petugas berusaha memasuki rumah dengan kekerasan untuk melakukan penangkapan
- (9) Petugas agar lebih berhati-hati dengan kesiagaan yang tinggi melakukan tindakan dengan memasuki rumah dengan memperhatikan teknik dan taktik pengepungan dan penggerebekan rumah
- (10) Penangkapan ditempat ramai dan terbuka dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - (a) Berusaha membuntuti orang yang akan ditangkap setelah sampai ditempat yang sepi baru dilakukan penangkapan.
 - (b) Apabila cara tersebut tidak mungkin dilakukan penangkapan dilakukan secara cepat dengan menyergapnya tanpa membahayakan dan menimbulkan kepanikan khalayak ramai.
 - (c) Setelah ditangkap segera diborgol sesuai dengan petunjuk pemborgolan dan petunjuk membawa tahanan.¹¹

¹¹ Rimba Zuraya, B.A Unit Sat Reskrim Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 9 Agustus 2016

(11) Dalam hal penangkapan terpaksa dilakukan ditempat gelap (malam hari), maka dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- (a) Terlebih dahulu melemparkan suatu benda untuk memancing reaksi dari orang yang akan ditangkap.
- (b) Jika petugas mempergunakan lampu senter jangan dipegang didepan badan, tetapi disamping badan sebisanya.

(12) Apabila orang yang akan ditangkap dalam keadaan sakit keras, maka atas hasil pengamatan petugas bila perlu dengan nasihat dokter , petugas mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- (a) Melaporkan dengan keadaan orang yang ditangkap kepada penyidik/penyidik pembantu yang mengeluarkan surat perintah penangkapan
- (b) Petugas menyampaikan perintah penyidik/ penyidik pembantu yang mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada orang yang akan ditangkap /keluarganya dapat berupa : Tetap tinggal di rumah

(13) apabila sedang dirawat di rumah sakit , tetap tinggal di rumah sakit, dengan pengawasan petugas polisi dan jaminan tidak melarikan diri dari keluarganya

(14) Apabila orang yang akan ditangkap memungkirkan identitas seperti dicantumkan dalam surat perintah penangkapan maka tindakan petugas adalah :

- (a) Meminta kepada orang yang bersangkutan menunjukkan tanda pengenal yang dimiliki. Apabila identitas yang tercantum dalam surat tanda pengenal tidak sama yang ada pada surat perintah maka perlu dilakukan penyelidikan kembali.

- (b) Untuk mendapatkan kepastian tentang orang yang bersangkutan perlu diusahakan mendapat keterangan dari penduduk sekitarnya terutama kepala desa/ ketua lingkungan setempat.
- (c) Apabila orang yang ditangkap memberikan keterangan yang tidak benar akan identitasnya agar segera dilakukan penangkapan.

(15) Dalam hal penangkapan harus dilakukan terhadap orang yang berdiam/ bertempat tinggal didaerah terpencil yang tidak dapat dicapai dalam waktu satu hari, maka tindakan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

- (a) Diterbitkan dua macam surat perintah ialah surat perintah membawa
- (b) Penyidik/pebantu penyidik memerintahkan penyidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap kepadanya, hal mana dimungkinkan berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 d angka 4 kuhap.
- (c) Untuk kepentingan ini maka penyidik diberikan surat perintah tugas dan surat perintah membawa, orang yang akan ditangkap diambil/dijemput oleh penyidik ditempat kediaman ia berada dengan surat perintah membawa.
- (d) Sesampainya orang yang akan ditangkap ditempat kedudukan penyidik/penyidik pembantu, maka dikenakan surat perintah penangkapan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadapnya guna menentukan status orang yang ditangkap lebih lanjut.
- (e) Tindakan lain adalah penyidik/penyidik pembantu datang sendiri ketempat kediaman orang yang akan ditangkap untuk melakukan penangkapan dan sekaligus memeriksa tersangka tersebut ditempat.

(16) Dalam melakukan penangkapan diusahakan agar tersangka tidak dapat meloloskan diri, melakukan perbuatan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri atau perbuatan yang membahayakan petugas sendiri

(17) Apabila tersangka yang ditangkap berkebangsaan asing, maka sesuai dengan jalur pelaporan, hal tersebut diberitahukan kepada departemen luar negeri RI guna diteruskan kepada perwakilan negara tersangka tersebut

(18) Dalam hal penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan untuk memenuhi permintaan dari jaksa atau hakim, maka tersangka atau terdakwa berikut berita acara penangkapannya diserahkan kepada yang meminta penyerahan tersangka tersebut.¹²

b. Penangkapan Tanpa Surat Penangkapan (Tertangkap Tangan)

1) Petugas Polisi Sendiri

Apabila anggota polri yang menemukan suatu tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan, maka tindakan yang diambil atau dilakukan adalah :

- a) Menangkap pelaku dan menyita barang bukti
- b) Melarang orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat sebelum pemeriksaan ditempat kejadian selesai.
- c) Melaporkan/menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada kesatuan polri atau lembaga yang sama fungsinya yang terdekat disertai dengan berita acara tentang tindakan yang telah dilakukan
- d) Kesatuan polri membuat laporan polisi dan memberikan tanda penerimaan laporan dan menyerahkan sebagaimana tersebut pada bagian (a) diatas.

¹² Himpunan juklak dan juknis tentang penyidikan tindak pidana

2. Hasil Riset Dan Wawancara Dengan Aparat Kepolisian Unit Satuan Resort Kriminal Polrestabes Makassar

Penulis mengambil lokasi penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, pada Satuan Reserse dan Kriminal. Adapun data jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sesuai klasifikasi pada Polrestabes Makassar yang dicatat sepanjang tahun 2014-2016 adalah, sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun			Jumlah
		2014	2015	2016	
1	Kejahatan yang dilaporkan	1440	1404	707	3551
2	Kejahatan yang diselesaikan	149	234	140	523
3	Presentasi	10,35	16,39	19,80	46,54

Keterangan :

1. Kejahatan yang dilaporkan adalah kejahatan yang telah dicatat dalam buku registrasi B1 sebagai data semua laporan kejahatan yang masuk ke Sentra Pelayanan Kepolisian Resor Kota Medan
2. Kejahatan yang diselesaikan adalah kejahatan yang dicatat dalam buku register B2 sebagai kejahatan yang telah selesai diproses di tahap Kepolisian dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.¹³

Dari beberapa banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang ada penulis mengambil salah satu diantaranya yaitu kasus pencurian kendaraan bermotor dengan tersangka acep darma atmaja alias bucek dan Rimba (DPO) yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 2014 di jalan landak baru depan (Studio musik) No 58 Kota Makassar.

¹³ Mujinah, Staf Urbin Ops Reskrim, *Wawancara*, Makassar, 9 Agustus 2016

Adapun Kasus Posisinya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/ 2939/ IX/ POLDASULSEL/ RESTABES MAKASSAR Tanggal 18 November 2014.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Pukul 00.30 WITA dijalan landak baru depan (Studio musik) No 58 Kota Makassar telah terjadi perkara secara tanpa hak dan melawan hukum mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki. Kasus tersebut dilaporkan pada hari Selasa 18 November 2014.

I. Perkara

Pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 dijalan landak baru depan (Studio musik) No 58 Kota Makassar telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e,ke 4e KUHPidana yang telah dilakukan tersangka acep darma atmaja alias bucek tempat/tgl lahir ujung pandang , 29 agustus 1996, agama islam, pekerjaan swasta (tukang parkir), tempat tinggal jl. Banta-bantaeng lorong 9 No 68 Kota Makassar bersama dengan temannya bernama rimba yang masih dalam pencarian (DPO).

2. Fakta-Fakta

a. Penanganan TKP

Tindakan pertama di tempat kejadian perkara berupa mendatangi TKP, melakukan penyidikan, melakukan penyamaran untuk mencari informasi dari seorang informan serta mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung.

b. Pemanggilan

- 1) Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi nama A.Hertasning yang beralamat di jalan masale 2 no 12 kota makassar pada tanggal 18 November 2014 telah dibuatkan berita acara pemeriksaan.
- 2) Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi nama Andhy yang beralamat di jalan racing center kompleks umi no.2 kota makassar, pada tanggal 18 November 2014 telah dibuatkan berita acara pemeriksaan.
- 3) Tanpa surat panggilan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi muhammad syachdar yang beralamat di jl.landak baru no 58 makassar, tanggal 18 November 2014 telah dibuatkan berita acara pemeriksaan.

c. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan No.Pol:SP.Kap/587/XI/2014/Reskrim tanggal 18 November 2014 pada hari itu juga telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka An. Acep darma atmaja alias bucek, tempat/tgl lahir ujung pandang , 29 agustus 1996, agama islam, pekerjaan swasta (tukang parkir), tempat tinggal jl. Banta-bantaeng lorong 9 no 68 Kota Makassar

d. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol:Sp. Han/321/ XI/ 2014/ Reskrim tanggal 18 November 2014 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka An. Acep darma atmaja alias bucek, tempat/tgl lahir ujung pandang , 29 agustus 1996, agama Islam, pekerjaan swasta (tukang parkir), tempat tinggal jl. Banta-bantaeng lorong 9 No 68 Kota Makassar.

e. Keterangan Saksi-saksi

Para saksi mengetahui secara langsung bahwa korban atas nama a.hertasning telah kehilangan 1 unit motor sky drive warna merah pada tanggal 18 Oktober 2014 Pukul 00.30 WITA di jalan landak baru depan (Studio musik) No 58 Kota Makassar.

3. Analisa Yuridis

Berdasarkan laporan, hasil pemeriksaan para saksi serta informasi dari informan dengan dikuatkan pula adanya pengakuan oleh tersangka pada saat dilakukannya pemeriksaan atas penangkapannya, beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna hitam yang bertuliskan marjinal dan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu yang dibelinya dari hasil penjualan motor yang dicuri, penyidik berpendapat bahwa terhadap perbuatan tersangka dapat disangka telah mengambil sesuatu barang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama dan dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara membuka pagar milik korban lalu membawa pergi sepeda motornya sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e dan ke 4e KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang Siapa ;
- b. Melakukan Pencurian ;
- c. Dilakukan pada waktu malam ;
- d. Dalam sebuah rumah/ pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- e. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih ;

a. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Bahwa rumusan **“Barang Siapa”** dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

Bahwa dalam kasus ini orang atau person yang telah melakukan tindak pidana adalah tersangka acep darma atmaja bersama dengan temannya bernama rimba yang masih dalam pencarian (DPO). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan dikepolisian, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan tersangka, maka tersangka acep darma atmaja dan tersangka rimba (DPO). merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Bahwa tersangka acep darma atmaja dan tersangka rimba (DPO) adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan

b. Melakukan Pencurian :

Bahwa terhadap diri tersangka acep darma atmaja bersama dengan temannya bernama rimba yang masih dalam pencarian (DPO) telah mengambil satu unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna merah No. Rangka MH41C12076AK524573, No. Mesin 2C1-523227, No. Pol. DD 4043 LS dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah milik korban kemudian tersangka acep

darma atmaja membawa keluar dari pekarangan bersama tersangka rimba (DPO) dengan cara mendorong kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut hal itu dibenarkan atas pengakuan tersangka sendiri pada saat dilakukannya pemeriksaan /introgasi setelah dirinya ditangkap.

Bahwa benar saksi hertasning dalam kesaksiannya menyampaikan barang yang diambil adalah 1 unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna merah No.Rangka MH41C12076AK524573, No. Mesin 2C1-523227, No. Pol. DD 4043 LS

Bahwa benar saksi andhy dan muhammad syachdar menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu kedua saksi tersebut berada dirumah korban , Dengan demikian Unsur **“melakukan pencurian”** telah terbukti

c. Dilakukan Pada Waktu Malam :

Bahwa tersangka acep darma atmaja alias bucek mengaku melakukan pencurian bersama dengan temannya rimba (DPO) Pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 Pukul 00.30 WITA dijalan landak baru depan (Studio musik) No 58 Kota Makassar dipekarangan rumah milik korban a.hertasning

Bahwa saksi andhy dan muhammad syachdar menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu kedua saksi tersebut berada dirumah korban Dengan demikian Unsur **“dilakukan pada waktu malam”** telah terbukti

d. Dalam Sebuah Rumah/ Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya :

Bahwa benar tersangka bersama-sama melakukan pencurian Pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 Pukul 00.30 WITA dijalan landak baru depan (Studio musik) No 58 Kota Makassar dipekarangan rumah milik korban a.hertasning

Bahwa terhadap diri tersangka acep darma atmaja bersama dengan temannya bernama rimba yang masih dalam pencarian (DPO) telah mengambil satu unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna merah No. Rangka MH41C12076AK524573, No. Mesin 2C1-523227, No. Pol. DD 4043 LS dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah milik korban kemudian tersangka acep darma atmaja membawa keluar dari pekarangan bersama tersangka rimba (DPO) dengan cara mendorong kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut hal itu dibenarkan atas pengakuan tersangka sendiri pada saat dilakukannya pemeriksaan /introgasi pada saat dilakukannya penangkapan.

Bahwa benar saksi andhy dan muhammad syachdar menerangkan mengetahui kejadian tersebut atas hilangnya sepeda motor milik korban a.hertasning Pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 Pukul 00.30 WITA dijalan landak baru depan (Studio musik) No 58 Kota Makassar dipekarangan rumahnya karena pada saat itu kedua saksi tersebut berada dirumah korban Dengan demikian Unsur **“dilakukan pada waktu malam”** telah terbukti

e. Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Bersama-Sama Atau Lebih :

Bahwa tersangka mengaku melakukan pencurian bersama dengan temannya bernama rimba yang masih dalam pencarian (DPO). Pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 Pukul 00.30 WITA dijalan landak baru depan (Studio musik) No 58 Kota Makassar dipekarangan rumah milik korban a.hertasning

Dengan demikian Unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih”** telah terbukti

4. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan diatas bahwa tersangka sdr. acep darma atmaja alias bucek, tempat/tgl lahir ujung pandang , 29 agustus 1996, agama Islam, pekerjaan swasta (tukang parkir), tempat tinggal jl. Banta-bantaeng lorong 9 No 68 Kota Makassar, tanpa hak dan melawan hukum telah mengambil sesuatu barang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama dan dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara membuka pagar milik korban lalu membawa pergi sepeda motornya. Oleh karena itu, penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e dan ke 4e KUHPidana.

Tim Sat Reskrim Polrestabes Makassar dalam melaksanakan tugasnya, setelah menerima laporan dari masyarakat dan atau menemukan adanya tindak pidana, maka tim segera melakukan penyelidikan. Kemudian diusahakan supaya pelaku tertangkap tangan, sehingga dapat dilakukan upaya paksa terhadap pihak yang melawan hukum tersebut dan barang bukti dapat di peroleh. Upaya paksa yang dapat dilakukan adalah pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan.

Dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diperlukan kerjasama dari aparat penegak hukum dengan lembaga terkait lainnya.

Apabila telah ditemukan seseorang yang tertangkap tangan sedang melakukan pencurian, maka orang tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah petugas mendapat surat perintah penyidikan dari Kepala Satuan Reserse

Kriminal yang berisi tentang para pihak yang berwenang dalam menyidik perkara tersebut.,.

Salah satu langkah yang digunakan oleh tim adalah undercover (penyamaran) hal ini dikarenakan adanya rasa enggan dari masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana, terutama apabila mereka merasa mengenal pelaku. Supaya dapat dibawa kemeja hijau, pihak yang melakukan kejahatan diupayakan harus tertangkap tangan, karena pengajuannya berdasarkan adanya barang bukti yang dimiliki disimpan untuk dimiliki, atau bahkan menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh para pihak.

Dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan tersangka acep darma atmaja alias bucek, yang menjadi penyidik adalah Brigadir Rimba Zuraya, Briptu Irwan dan briptu herman. Pelaksanaan penangkapan dengan tersangka acep darma atmaja alias bucek dilakukan di depan alfamart pada saat melakukan pekerjaan sebagai tukang parkir hal ini diketahui melalui informasi seorang informan dari kepolisian yang mengetahui dari salah seorang masyarakat bahwa pada saat berkumpul bersama temannya dia sering menceritakan kesana kemari aksinya perihal pencurian yang dia lakukan bersama temannya rimba yang sampai saat ini masih dalam pencarian (DPO) berdasarkan informasi inilah yang kemudian penyidik mencoba mencari tau secara lebih detail dan kemudian dilakukan penangkapan

Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dengan tersangka acep darma atmaja alias bucek ini dilakukan Dengan Surat Perintah Penangkapan No.Pol:SP.Kap/587/XI/2014/Reskrim yang kemudian diberikan salinannya kepada keluarga tersangka dikediamannya jl. Banta-bantaeng lorong 9 No 68 Kota Makassar.

Pelaksanaan penangkapan oleh penyidik dengan tersangka acep darma atmaja alias bucek berdasarkan pada Pasal dalam KUHAP :

a) Pasal 1 angka 20 KUHAP

“Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan tersangka atau terdakwa sementara waktu di mana terdapat dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didukung bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan”

Dalam kasus ini yang ditangkap adalah tersangka acep darma atmaja alias bucek yang beralamat jl. Banta-bantaeng lorong 9 No 68 Kota Makassar, perihal 2 bukti permulaan yang cukup dimaksud ialah Berdasarkan laporan polisi Nomor LP/ 2939/ IX/ POLDASULSEL/ RESTABES MAKASSAR Tanggal 18 November 2014. Dan Keterangan Saksi-saksi serta adanya informasi dari informan kepolisian yang melakukan penyamaran/under cover untuk mencari tau dimasyarakat.

b) Pasal 16 ayat 2 KUHAP

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”

Dalam kasus ini yang bertindak sebagai penyidik ialah Brigadir Rimba Zuraya, Briptu Irwan dan briptu herman.

c) Pasal 17 KUHAP

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Dalam kasus ini bukti permulaan yang cukup ialah :

- 1) Laporan polisi laporan polisi Nomor LP/ 2939/ IX/ POLDASULSEL/ RESTABES MAKASSAR Tanggal 18 November 2014.

- 2) Keterangan Saksi-saksi serta adanya informasi dari informan kepolisian yang melakukan penyamaran/under cover.

d) Pasal 18 ayat 1 KUHAP

“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”

Dalam kasus ini yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian dari polrestabes makassar dengan surat perintah penangkapan No.Pol:SP.Kap/587/XI/2014/Reskrim tanggal 18 November 2014 terhadap tersangka An. Acep darma atmaja alias bucek, tempat/tgl lahir ujung pandang , 29 agustus 1996, agama islam, pekerjaan swasta (tukang parkir), tempat tinggal jl. Banta-bantaeng lorong 9 no 68 kota makassar dengan alasan penangkapan melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dikuatkan dengan kesaksian para saksi dan informasi dari informan kepolisian yang didapatnya dari masyarakat.

e) Pasal 18 ayat 3 KUHAP

“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”

Dalam kasus ini tembusan surat perintah penangkapan langsung diberikan kepada keluarga tersangka dalam hal ini ialah ibunya pada saat dilakukannya penangkapan terhadap acep darma atmaja alias bucek di depan alfamart di jl.landak baru.

f) Pasal 19 ayat 1

“Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan paling lama 1 hari”

Dalam kasus ini penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka acep darma atmaja alias bucek dilakukan 1 hari dan juga dikuatkan atas dasar pengakuannya sendiri melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor milik korban a.hertasning

Berdasarkan fakta-fakta diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka acep darma atmaja alias bucek oleh Unit Sat Reskrim Polrestabes Makassar telah memenuhi ketentuan tatacara penangkapan sesuai yang tercantum dalam KUHAP, khususnya dalam Pasal 16- Pasal 19 KUHAP.

g) Pasal 75 KUHAP berbunyi :

1. “Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. pemasukan rumah;
 - f. penyitaan benda;
 - g. pemeriksaan surat;
 - h. pemeriksaan saksi;
 - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

2. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
3. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat tindakan tersebut pada ayat (1)

Dalam kasus ini setelah dilakukannya penangkapan sampai pemeriksaan penyidik telah membuatkan berita acara penangkapan terhadap acep darma atmaja yang kemudian ditanda tangani oleh pihak penyidik dan juga ditanda tangani tersangka sendiri.



3. Hasil Riset Dan Wawancara Dengan Tahanan Polrestabes Makassar

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tahanan polrestabes makassar yang masih ditahan dan sudah lepas diperoleh menurut pengakuan mereka yang menyebutkan :

- a. Penangkapan dilakukan secara kasar
- b. Tidak memberitahukan hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP
- c. Penangkapan tersangka yang tidak tertangkap tangan pada umumnya ditangkap pakai surat penangkapan hanya saja surat tebusan bagi keluarga tersangka sering terlambat diberikan kepada keluarga tersangka sesudah tersangka tertangkap
- d. Hasil pengamatan diperoleh bahwa terhadap tersangka yang tertangkap tangan oleh masyarakat biasanya tersangka dikeroyok massa dulu sampai babak belur kemudian diserahkan ke aparat kepolisian
- e. Tidak jelasnya barang bukti
- f. Selama menjalani penangkapan selama satu hari (dikantor polisi) para tersangka banyak mengalami pemaksaan dari pihak penyidik dimana para tersangka diperiksa dengan kasar, ditanyai dengan menggunakan kekerasan dan dipaksa untuk mengaku.¹⁴

¹⁴ Acep Darma Atamaja Dan Supardi, Mantan Narapidana Dan Tahanan Polrestabes Makassar Dalam Kasus Tindak Pidana Curanmor, *Wawancara*, Makassar, 15 Agustus 2016

Upaya paksa dilakukan dengan aparat kepolisian terhadap tersangka saat minta pengakuan dan diperiksa setelah ditangkap tersebut diketahui oleh penulis ketika melakukan wawancara dengan para tahanan yang umumnya mereka takut untuk memberitahunya, namun mereka mau memberitahunya dengan secara lisan saja.

Ketakutan dari tersangka-tersebut juga dituangkan oleh para tersangka didalam harapan-harapan mereka atas pertanyaan yang disampaikan dalam wawancara dengan penulis.

Dalam harapan para tersangka tersebut mengatakan supaya :

- a. Tidak diganggu dalam proses dan tahanan
- b. Apabila tersangka sudah mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit maka diproseslah sesuai dengan hukum yang berlaku
- c. Bertanya kepada tersangka janganlah kasar-kasar
- d. Polisi jangan sewenang-wenang terhadap tersangka
- e. Jangan melakukan kekerasan dan upaya paksa

Dari wawancara penulis yang dilakukan terhadap pihak kepolisian bahwa mereka melakukan upaya paksa terhadap tersangka yang melakukan perlawanan dan dalam hal tertentu penyidik melakukan diskresi dalam situasi dan kondisi tertentu. Penyidik diPolrestabes Makassar selama ini telah melakukan penangkapan yang sesuai dengan pasal 16,17,18 dan 19 KUHP.

C. *Kendala-Kendala Dalam Melakukan Penangkapan*

Suatu hal yang diharapkan dari penangkapan adalah dilakukannya penangkapan terhadap orang-orang yang benar-benar merupakan pelaku suatu tindak pidana dan tidak melanggar hak azasi manusia. Perwujudan harapan tersebut pada kenyataannya sulit dipraktekkan dilapangan. Penyebab dan segi teknis yang diperoleh dari hasil pengamatan antara lain :

1. Tersangka

Tersangka sebagai orang yang ditangkap, tidak sadar akan kesalahannya sehingga sering melawan dan mempersulit proses penangkapan yang dikarenakan kurangnya moral yang dimiliki orang tersebut. Dijumpai tersangka memberikan keterangan yang berbelit-belit, menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya didalam proses pemeriksaan dan bertindak sering melawan petugas ketika ditangkap

2. Kurangnya alat bukti dan saksi

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana curanmor kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana curanmor.

3. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungap kasus sebagai jaringan informasi.

4. Pihak keluarga yang ditangkap

Keluarga tersangka sering menghambat proses penangkapan yang terkadang berusaha menyembunyikan tersangka malahan bahkan bisa dikatakan sering membantu tersangka untuk melarikan diri. Pihak keluarga karena perasaan bersaudara dengan tersangka menyebabkan melupakan bahwa saudaranya tersebut adalah orang yang bersalah ,meskipun ia sadar dan tahu benar terhadap orang yang bersalah sudah semestinya dihukum menurut undang-undang yang berlaku, tetapi mereka tidak memperhatikan penegakan hukum, mereka mengutamakan kepentingan keluarga mereka agar salah satu anggota keluarga mereka tersebut tidak ditangkap dan tidak dipenjara.



D. *Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penangkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian didalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu , maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Tidak setiap kegiatan atau usaha bertujuan supaya masyarakat dapat mentaati hukum. Keputusan hukum tidak akan tercipta bila masyarakat itu sendiri tidak paham dan mengerti hukum. Masyarakat masih enggan untuk membantu tugas dari penegak hukum dalam menangani suatu perkara. Masyarakat kebanyakan takut akan berakibat tidak baik terhadap dirinya bila membantu tugas polisi apalagi untuk menjadi saksi. Selain itu banyak masyarakat yang belum mengetahui apa yang menjadi kewajibannya sehingga sering muncul tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum namun dibiarkan dan ditinggalkan saja serta mengikuti apa saja kemauan dari aparat kepolisian tersebut.

Untuk itu dalam mengantisipasi serta menanggulangi kendala-kendala yang timbul dimasyarakat maka upaya yang dilakukan

1. Tersangka diberi tindakan tegas agar mau bekerja sama dalam proses penegakan hukum di indonesia
2. Penyuluhan/penerangan yang berkesinambungan terhadap masyarakat tentang hukum sehingga dapat memotivasi masyarakat agar mau ikut berperan serta dan agar lebih aktif untuk mengetahui dengan pasti hak-hak dan kewajiban mereka menurut hukum
3. Memberikan jaminan hukum dan penghargaan terhadap masyarakat yang membantu penegakan hukum
4. Keluarga tersangka diberi pengertian dan pemahaman agar mau bekerjasama karena melindungi suatu kejahatan itu dapat dipidana.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Dari hasil penelitian dan pembahasan di Polrestabes Makassar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penangkapan diwilayah hukum Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang diatur dalam KUHAP. Namun masih dijumpai tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan dan diskresi pada situasi dan kondisi tertentu. Tahanan sering menerima perlakuan kasar dan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh penyidik.

2. Dalam Pelaksanaan Penangkapan terdapat kendala-kendala yang dijumpai pada prakteknya berupa :

- a. Tersangka tidak menyadari kesalahannya dan masih belum mengerti hukum
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penangkapan
- c. Pihak keluarga tersangka belum menyadari pentingnya penegakan hukum.

3. Upaya untuk menanggulangi hambatan dari kendala-kendala dalam pelaksanaan penangkapan itu adalah :

- a. Dilakukan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat tentang hukum

- b. Masyarakat lebih berperan aktif untuk mengetahui hukum dan berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum
- c. Pemberian jaminan hukum bagi masyarakat yang menjadi saksi dan pemberian hadiah bagi masyarakat yang membantu penegakan hukum

B. *Saran*

Bedasarkan hasil penelitian yang telah disusun oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi tersangka yang ditangkap agar dapat lebih bekerjasama Seharusnya masyarakat dapat menerima kembali dan tidak mengucilkan Narapidana Anak yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga mereka merasa nyaman dan tidak menhulangi kejahatannya lagi dan diharapkan bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi.
2. Sebaiknya pejabat penyidik dalam melakukan proses penyidikan harus berlandaskan peraturan hukum yang berlaku dan dalam melakukan penangkapan penyidik harus berperan sesuai hak dan kewajiban yang dimilikinya
3. Masyarakat haruslah sadar bahwa proses penegakan hukum bukanlah hanya tugas dari aparat penegak hukum saja, melainkan juga tugas dari masyarakat dalam menanggulangi, menghadapi segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat sehingga dengan adanya kesadaran ini lambat laun tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan sedikit demi sedikit menjadi berkurang.

BAB V PENUTUP	92-93
A. Kesimpulan	92
B. Saran.	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97



DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal.3.
- A.Hamzah dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2000, hal. 24
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), h.71.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 30.
- Atamaja, Acep Darma Dan Supardi, Mantan Narapidana Dan Tahanan Polrestabes Makassar Dalam Kasus Tindak Pidana Curanmor, *Wawancara*, Makassar, 15 Agustus 2016
- Buku pedoman pelaksanaan tugas POLRI dilapangan*, 1992 h.59
- Blackstone, 1979; Warner, 1983.
- Kansil,C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, h.54
- Himpunan juklak dan juknis tentang penyidikan tindak pidana*
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, h.100.
- Ibrahim, Johnny.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, h.392
- Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta: Prenhallindo, 2007, h.30.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . Jakarta Selatan: Wali, 2010.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008, h.46.
- Mujinah, Staf Urbin Ops Reskrim, *Wawancara*, Makassar, 9 Agustus 2016
- Petunjuk Teknik Reserse*, H.6
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab 1, pasal 1 ayat 3.
- Zuraya,Rimba. B.A Unit Sat Reskrim Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 9 Agustus 2016
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010, h. 72.
- Saleh, Roeslan. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional* . Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996, h.15.

- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra AdityaBarkti, 2007, h.26
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika, 2002, h.204.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa Tanpa Tahun, h.4
- Surat Keputusan Direktur Pendidikan Polri, *Buku Pelajaran Umum Kepolisian*, h.173.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana, 2003, h.24-25.
- Projodikoro, Wiryono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT. ERESKO, 2002), h.50.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.158.
- <http://indonesia.ucanews.com/2014/06/26/polisi-dikecam-terkait-dugaan-kasus-salah-tangkap/> pada tanggal 22 juni 2016 pukul 07.49 wita.
- <http://Republika.com/2015/02/17/Penangkapan-kasus-pencurian-kendaraan-bermotor/> pada tanggal 22 juni 2016 pukul 07.49 wita.
- <http://hariyono1407.blogspot.co.id/2012/04/hukum-pencurian-dalam-islam.html>, pada tanggal 23 juni 2016 pukul 09.49 wita.

RIWAYAT PENULIS



Muh. Rachmat, lahir di Sungguminasa, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 1993. Penulis merupakan anak kedua dari tiga orang bersaudara oleh pasangan A. Bauru Daeng Gau dan Nurintang Daeng Puji. Pendidikan pertama sekolah dasar di tempuh penulis di SD Inpres Saluttowa, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Tinggimoncong, dan SMA Negeri 1 Pallangga.

Pada tahun 2012 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Makassar melalui jalur SBMPTN, penulis berhasil masuk di UIN Alauddin Makassar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum tepatnya di Jurusan Ilmu Hukum yang merupakan pilihan pertama pada saat mendaftar. Selama penulis menjadi mahasiswa di UIN Alauddin Makassar, penulis mengikuti beberapa organisasi internal dan eksternal kampus diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum, Senat Mahasiswa (SEMA), UKM Taekwondo, UKM PMI dan Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) UIN Alauddin Makassar.